

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian pada bab IV, mengenai pengaruh kepuasan kompensasi dan kultur organisasi terhadap *fraud* di sektor pemerintahan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh antara kepuasan kompensasi terhadap *fraud* di sektor pemerintahan Kabupaten Malaka. Kepuasan kompensasi di sektor pemerintahan Kabupaten Malaka termasuk dalam pemerintahan yang baik.
2. Terdapat Pengaruh antara kultur organisasi terhadap *fraud* di sektor pemerintahan Kabupaten Malaka. Kultur organisasi termasuk di sektor pemerintahan Kabupaten Malaka yang baik pula.

5.2 Implikasi Teoritis

Mangkuprawira (2002:196), menyatakan bahwa kompensasi merupakan bentuk pembayaran tunai langsung, pembayaran tidak langsung dalam bentuk manfaat bagi karyawan dan insentif yang memotivasi karyawan bekerja keras dalam mencapai produktivitas kerja yang semakin tinggi. Handoko (1993), Kompensasi adalah pemberian pembayaran finansial kepada karyawan sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilaksanakan dan sebagai motivasi pelaksanaan kegiatan di waktu yang akan datang. Kompensasi merupakan salah satu unsur yang penting yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan, sebab kompensasi adalah alat untuk memenuhi

berbagai kebutuhan pegawai, sehingga dengan kompensasi yang diberikan pegawai akan termotivasi untuk bekerja lebih giat (Hariandja, 2002).

kultur organisasi merupakan nilai, norma, dan konsep dasar yang dianut oleh anggota organisasi yang mempengaruhi perilaku dan cara kerja anggota organisasi. Peran kultur organisasi sangat penting, yaitu sebagai penentu arah, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, bagaimana mengelola dan mengalokasikan sumber daya organisasi serta sebagai alat untuk menghadapi masalah dan peluang dari lingkungan internal dan eksternal (Lako, 2002).

Jenis kecurangan (*fraud*) yang sering terjadi di sektor pemerintahan adalah korupsi. Secara umum korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan publik atau pemilik untuk kepentingan pribadi (Alatas, 1987). Menurut Susanto (2001) korupsi pada level pemerintahan daerah adalah dari sisi penerimaan, pemerasan uang suap, pemberian perlindungan, pencurian barang-barang publik untuk kepentingan pribadi. Sementara tipe korupsi menurut de Asis (2000) adalah korupsi politik, misalnya perilaku curang (politik uang) pada pemilihan anggota legislatif ataupun pejabat-pejabat eksekutif, dana ilegal untuk pembiayaan kampanye, penyelesaian konflik parlemen melalui cara-cara ilegal dan teknik lobi yang menyimpang). Tipe korupsi yang terakhir yaitu clientelism (pola hubungan langganan).

Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen X memberikan pengaruh positif terhadap variabel dependen Y. Dilihat dari hasil koefisien determinasi atau angka R Square dapat menjelaskan sebesar 0,429 berpengaruh terhadap variabel Y dan sisanya sebesar 57% dipengaruhi oleh penelitian lain yang tidak ikut sertakan dalam penelitian ini.

5.3 Implikasi Terapan

Hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat menjadi bahan acuan bagi kantor Bupati Malaka.

1. Untuk instansi pemerintah Kabupaten Malaka diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kompensasi dan kultur organisasi untuk menghindari faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya fraud.
2. Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik dengan permasalahan yang sama dengan penelitian ini, sebaiknya melakukan penelitian terhadap objek yang lebih luas dengan memperbanyak sampel terhadap instansi-instansi yang ada Kabupaten Malaka.